UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Asas Itikad Baik Dan Pelindungan Hukum Bagi Anggota Kelompok Dalam Perjanjian Pinjam
Meminjam Dengan Sistem Tanggung Renteng Di Koperasi Setia Budi Wanita Malang**
Aisyah Aulia, Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KELOMPOK DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DI KOPERASI SETIA BUDI WANITA MALANG

Oleh: Aisyah Aulia[1], Alfatika Aunuriella Dini[2]

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pinjam meminjam dengan sistem tanggung renteng serta pelindungan hukum bagi para anggota kelompok apabila terdapat anggota peminjam yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan sistem tanggung renteng di Koperasi Setia Budi Wanita Malang.

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik dalam perjanjian pinjam meminjam dengan sistem tanggung renteng di Koperasi Setia Budi Wanita Malang sebelum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Itikad baik subjektif telah ditunjukkan oleh peminjam, namun belum sepenuhnya diterapkan oleh Para Peminjam dalam proses analisis pinjaman, sedangkan itikad baik objektif belum terpenuhi karena masih terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Pelindungan Hukum bagi anggota kelompok secara internal adalah berupa *rescheduling*, mekanisme "kewajiban kelompok", dan mekanisme "klop-klopan" yang sejalan dengan perjumpaan utang atau kompensasi dalam Pasal 1426 KUHPerdata. Sementara itu, Pelindungan hukum eksternal diberikan melalui Pasal 1295 KUHPerdata, yang memberi hak menuntut kembali pembayaran atau ganti rugi dari peminjam, dan Pasal 29 ayat (1) huruf b Permenkop UKM 8/2023 yang mengatur tanggung renteng sebagai salah satu mitigasi risiko koperasi.

Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Perlindungan Hukum, Perjanjian Pinjam Meminjam, Koperasi

---

[1] Mahasiswa Strata-1 (S-1), Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

[2] Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Asas Itikad Baik Dan Pelindungan Hukum Bagi Anggota Kelompok Dalam Perjanjian Pinjam
Meminjam Dengan Sistem Tanggung Renteng Di Koperasi Setia Budi Wanita Malang**
Aisyah Aulia, Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH AND LEGAL PROTECTION FOR GROUP MEMBERS IN LOAN AGREEMENTS UNDER A JOINT AND SEVERAL LIABILITY SYSTEM AT THE SETIA BUDI WANITA COOPERATIVE MALANG

Oleh: Aisyah Aulia[3], Alfatika Aunuriella Dini[4]

ABSTRACT

This legal writing aims to find out and analyze the implementation of the principle of good faith in loan agreements under a joint and several liability system, as well as the legal protection afforded to group members in the event that a borrowing member defaults on a loan agreement under a joint and several liability system at the Setia Budi Wanita Cooperative in Malang.

This research employs an empirical juridical method. Empirical juridical is a legal research approach that examines applicable legal provisions by observing real-world situations in society to identify problems, ultimately leading to their resolution. The data obtained were analyzed using qualitative methods and described in a descriptive manner.

The results of the study indicate that the principle of good faith in loan agreements under the joint liability system at the Setia Budi Wanita Cooperative in Malang has not yet been fully and properly implemented. Subjective good faith has been demonstrated by borrowers, but has not yet been fully applied by group members in the loan analysis process. Meanwhile, objective good faith has not been fulfilled due to ongoing delays in installment payments. Internal Legal protections for group members within the group take the form of rescheduling, the "group liability" mechanism, and the "klop-klopan" mechanism, which are consistent with the concepts of debt settlement or compensation under Articles 1426 of the Civil Code. Furthermore, external legal protection is provided through Article 1295 of the Civil Code, which grants the guarantor the right to demand repayment from the borrower, and Article 29(1)(b) of Ministry of Cooperatives and SMEs Regulation No. 8/2023, which regulates joint and several liability as one of the cooperative's risk mitigation measures.

***Keywords**: Principle of Good Faith, Legal Protection, Loan Agreement, Cooperative*

[3] Undergraduate Student (S-1) of Department of Civil Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University
[4] Lecturer of Department of Civil Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University